

BPK RI Minta Pemprov Laksanakan Semua Rekomendasi

Yulan Mirza
Borneo Tribune, Pontianak

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar, Ketua Pansus LHP BPK RI, Tony Kurniadi menegaskan bahwa sebelumnya pihaknya sudah meminta saran dan masukan dari BPK RI terkait langkah-langkah yang harus

dilakukan Pemerintah Provinsi dalam usahanya untuk memperbaiki pengelolaan keuangan negara untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Koordinasikan status data tindak lanjut LHP BPK RI atas LKPD Tahun 2010, serta konsultasi mengenai temuan-temuan baru terkait dengan pemeriksaan manajemen aset yang baru saja selesai dilaksanakan oleh BPK

RI," jelas Tony, Minggu (25/9) kemarin.

Sebelumnya, BPK melaporkan hasil temuan mengenai kerugian Daerah Provinsi Kalimantan Barat sesuai LHP No 11/ HP/ XIX.PNK /02/2011 tanggal 25 Februari 2011 terdapat 178 kasus /temuan senilai Rp. 156.050.046.632,41 dan \$ 11.709.282,89.

Diantaranya, lanjutnya, kasus yang telah mempunyai

BPK RI Minta Pemprov Laksanakan Semua Rekomendasi

kekuatan hukum tetap ada satu kasus yakni, kerugian daerah yang penanggungjawabnya bendahara sebanyak satu kasus dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp.42.204.673 dan sudah diangsur senilai Rp 20.204.673 sehingga masih sisa sebesar Rp.22.000.000.

Kedua, kata Tony, kasus yang dalam proses penetapan pembebanannya ada delapan belas kasus yakni kerugian daerah yang penanggungjawabnya bendahara sebanyak tujuh kasus dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp. 677.497.862 dan telah diangsur senilai Rp. 34.095.525 sehingga masih sisa Rp.643. 402.337.

Ketiga, kerugian daerah yang penanggungjawabnya PNS Non Bendahara empat kasus dengan nilai kerugian daerah Rp16.720.069.960 dan telah diangsur senilai Rp 506.287.000 sehingga masih

sisa Rp16.213.782.960.

Keempat, kerugian daerah yang penanggungjawabnya pihak ketiga ada tujuh kasus dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp 26.660.042.699,07 dan tidak ada angsuran dari pihak ketiga.

Sementara, lanjut Tony, untuk kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi ada 159 kasus yakni: laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK-RI) ada enam puluh delapan kasus dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp.94.838.630.310,16 dan telah disetor ke kas daerah sebesar Rp.683.516.372,75 sehingga masih sisa Rp. 94.149.113.937,41

Dan terakhir, Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi (LHP APIP) ada 91 kasus dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp 20.526.783.468,93 dan USD 11.709.282,89 telah disetor ke kas daerah

sebesar Rp. 2.165.078.770,- sehingga masih sisa Rp: 18.361.704.698,93 dan USD 11.709.282,89

Sementara Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Kalbar, Sigit Pratama Yudha menjelaskan bahwa BPK RI sebagai lembaga negara yang bertugas untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan.

Menanggapi beberapa permasalahan yang menjadi perhatian Pansus DPRD Provinsi Kalbar, kata Sigit, BPK RI meminta kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melaksanakan semua rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK dalam setiap Laporan Hasil Pemeriksaan.

"Status tindak lanjut akan disampaikan tiap semester setelah sebelumnya melalui proses pembahasan. Untuk temuan pemeriksaan manajemen aset, saat ini

“

Status tindak lanjut akan disampaikan tiap semester setelah sebelumnya melalui proses pembahasan. Untuk temuan pemeriksaan manajemen aset, saat ini sedang dalam proses penyusunan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP)

”

sedang dalam proses penyusunan Konsep Hasil Pemeriksaan (KHP)," ujarnya. □